



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**
3. NHK : **547202**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 267.240.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/85 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 267.240.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 295.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN VIOS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L EXCEED Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 76.530.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.245.725

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 706.015.725

III. HUTANG Rp. 96.193.130

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 609.822.595

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.